

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintah yang baik (*good governance*), telah mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006, hal 17). Pemerintah harus mampu untuk menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk di dengar aspirasinya.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, pemerintah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (stakeholder).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Laporan keuangan pemerintah daerah kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan

pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan apabila tidak sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi keuangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan.

Tabel 1.1

Jumlah dan Kelompok Temuan SPI pada pemeriksaan LKPD

Tahun 2014

No.	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Kasus
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
1.	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	365
2.	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	388
3.	Kelemahan Struktur Pengendalian Itern	156
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		909

(Sumber : www.bpk.go.id-IHPS II Tahun 2014)

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 524 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2014 menemukan 909 kasus kelemahan Sistem Pengendalian

Intern(SPI) yang meliputi Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan, Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja, dan Kelemahan Struktur Pengendalian Interen. Jumlah permasalahan tiap – tiap sub kelompok temuan disajikan dalam tabel 1.1 di atas.

BPK juga telah melakukan audit atas LKPD selama lima tahun, dari 2009 – 2013. Perkembangan opini atas 524 LKPD tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya (2013) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut ditunjukkan kenaikan opini atas 88 LKPD. Kenaikan opini tersebut meliputi dari Tidak Wajar (TW) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 23 LKPD, dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 55 LKPD, dan dari Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 10 LKPD. Secara keseluruhan, jumlah LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami kenaikan dari 120 LKPD menjadi 156 LKPD atau naik sebesar 6,87%. Namun, terdapat pula peningkatan jumlah LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dari 6 LKPD menjadi 11 LKPD atau sebesar 0,95%. (Sumber : www.bpk.go.id IHPS II 2014:84).

Fakta pada pemerintah daerah Kabupaten Ngada, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Ngada adalah Wajar Dengan

Pengecualian. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Ngada yaitu :

1. Terdapat selisih saldo kas TA 2013 antara Buku Kas Umum Daerah dengan saldo kas /bank dan Setara Kas minimal yang berindikasi Kerugian Negara.
2. Piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2013 tidak didukung dengan Surat Keterangan Pembebanan.
3. Terdapat tiga paket pekerjaan atas kegiatan belanja modal bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Ngada yang tidak sesuai spesifikasi kontrak.
4. Proses pengadaan dan pelaksanaan atas 14 paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan atas 9 paket pekerjaan belum dikenakan.

Berdasarkan hasil laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern. Kelemahan dalam sistem pengendalian interen pada Pemerintah Kabupaten Ngada yaitu :

1. Pengelolaan investasi Non Permanen Dana bergulir pemerintah Kab. Ngada tidak tertib dan terdapat pengguliran pada Dinas-Dinass yang tidak dapat diyakini kebenaran penyaluran dan penatausahaan.
2. Pengelolaan dan penatausahaan Aset tetap Kab. Ngada belum sepenuhnya memadai dan disajikan secara akurat dalam daftar Inventaris Barang Milik Daerah.

3. Pengelolaan dan penatausahaan Belanja Pos Bantuan belum memadai dan terdapat pelampauan pada anggaran.

Kapasitas SDM dan Kelembagaan yang menangani fungsi akuntansi dan keuangan telah ditempati oleh personil dengan pengalaman yang memadai dan latar belakang pendidikan yang relevan. Hal ini telah menjamin adanya kapasitas dasar yang memadai dalam praktik akuntansi. Kekurangannya adalah Pejabat penatausahaan akuntansi belum tersebar secara merata pada semua SKPD dan intensitas pelatihan bagi personil dibidang penatausahaan akuntansi yang belum intensif. Kekurangan ini mengakibatkan aliran informasi akuntansi menjadi kurang lancar serta kesulitan bagi staf penatausahaan akuntansi untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan regulasi teknis dibidang akuntansi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada** “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tentang kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan kualitas informasi laporan keuangan Dinas pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada?
4. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas informasi laporan keuangan dalam hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi pimpinan Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menata kembali penyusunan laporan

keuangan dan meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah di masa mendatang.

2. Bagi Almamater, sebagai bahan sumbangan dalam memberikan referensi tambahan serta bahan informasi atau acuan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.